

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
(INKESRA)
KABUPATEN GARUT
2020**



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN GARUT**

<https://eplweb.bps.gp.id>

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
(*INKESRA*)
KABUPATEN GARUT

2020

<https://garutkab.bps.go.id>



Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Garut 2020

Nomor Publikasi : 32050.2050
Katalog BPS : 4102004.3205
ISSN : -
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman : xvi + 42 halaman

NASKAH :

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, BPS Kabupaten Garut

PENYUNTING :

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, BPS Kabupaten Garut

GAMBAR KULIT :

DITERBITKAN OLEH:

BPS Kabupaten Garut

Dilarang Mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik (UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 43 huruf b)

<https://garutkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN GARUT 2020**

Pengarah : Dody Gunawan Yusuf, S.Si

Editor : Yudi Surya Lesmana, S.Si

Penulis : Hendra Sukariyana, SE

Pengolah Data/
Penyiapan Draft : Ibnu Mubarak, S.ST., M.Si

<https://garutkab.bps.go.id>

<https://garutkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenan-Nyalah publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Garut Tahun 2019 ini bisa diterbitkan.

Publikasi ini berisi indikator-indikator kesejahteraan rakyat di Kabupaten Garut yang mencakup bidang Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan, dan Sosial.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan publikasi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharap kritik dan saran yang konstruktif untuk kesempurnaan publikasi ini di masa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga publikasi ini dapat terselesaikan. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Garut, November 2020
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Garut,



Dody Gunawan Yusuf, S.SI

<http://garutkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	xi
ISTILAH TEKNIS	xiii
1 PENDAHULUAN.....	1
2 KEPENDUDUKAN.....	9
3 KESEHATAN.....	15
4 PENDIDIKAN.....	21
5 KETENAGAKERJAAN.....	27
6 TARAF DAN POLA KONSUMSI.....	31
7 PERUMAHAN.....	35
8 SOSIAL LAINNYA.....	39

<https://garutkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR TABEL

	Halaman
KEPENDUDUKAN	
Tabel 2.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Garut, 2015-2019	10
Tabel 2.2 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Garut, 2013-2019	14
KESEHATAN	
Tabel 3.1 Persentase Anak Usia 0-23 Bulan yang Pernah Disusui dan Rata-rata Lama Disusui di Kabupaten Garut, Tahun 2019	17
Tabel 3.2 Persentase Anak Umur 0-59 Bulan(Balita) yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Garut, 2018 dan 2019	18
PENDIDIKAN	
Tabel 4.1 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/ STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut, 2018 dan 2019	25
TARAF DAN POLA KONSUMSI	
Tabel 6.1 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Garut, 2018 dan 2019	32
PERUMAHAN	
Tabel 7.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Garut, Tahun 2019	37

Tabel 7.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kabupaten Garut, Tahun 2019	38
-----------	---	----

SOSIAL LAINNYA

Tabel 8.2	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Garut, 2018-2019	41
-----------	---	----

<https://garutkab.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
KEPENDUDUKAN	
Grafik 2.1 Piramida Penduduk Kabupaten Garut Tahun 2019	11
Grafik 2.2 Perkembangan Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten Garut Periode 2010-2019	12
KESEHATAN	
Grafik 3.1 Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Garut, 2013-2019	16
PENDIDIKAN	
Grafik 4.1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) (tahun) di Kabupaten Garut dan Provinsi Jawa Barat, 2015-2019	23
Grafik 4.2 Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) (tahun) di Kabupaten Garut dan Provinsi Jawa Barat, 2015-2019	24
KETENAGAKERJAAN	
Grafik 5.1 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Dan Angkatan Kerja di Kabupaten Garut, 2019	29

<https://garutkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongka

ISTILAH TEKNIS

Air Minum Bersih	Air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, serta pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (septic tank) > 10 meter.
Angka Beban Tanggungan	Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100.
Angka Harapan Hidup	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.
Angka Kesakitan	Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari.
Indeks Gini	Ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Koefisien Gini terletak antara nol yang mencerminkan pemerataan sempurna dan satu yang menggambarkan ketidakmerataan sempurna.
Kepadatan Penduduk	Rata-rata banyaknya penduduk per kilometer persegi.
Lapangan Usaha	Bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Kegiatan ini mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam satu digit.
Pekerja Tidak Dibayar	seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh penghasilan/keuntungan yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga atau bukan anggota rumah

tanggatanpa mendapat gaji

Perjalanan

Melakukan perjalanan pergi pulang (PP) sejauh minimal 100 Kilometer dan tidak dalam rangka mencari nafkah dan tidak dilakukan secara rutin

Perkotaan

Karakteristik sosial ekonomi dari wilayah administratif terkecil. Wilayah ini dikatakan sebagai perkotaan jika memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, lapangan kegiatan ekonomi utama, fasilitas-fasilitas perkotaan (jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya). Secara operasional penentuan daerah perkotaan dibuat dengan sistim skoring tertentu. Prosedur penentuan daerah perkotaan berlaku sejak tahun 1980 dan masih berlaku hingga saat ini.

Peserta Keluarga Berencana (Akseptor)

Orang yang mempraktekkan salah satu metode kontrasepsi.

Rasio Jenis Kelamin

Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di satu daerah pada waktu tertentu.

Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Tamat Sekolah

Menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat ijazah. Orang yang

belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian dan lulus dianggap tamat sekolah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Persentase pengangguran terhadap angkatan kerja

Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase.

<https://garutkab.go.id>

<https://garutkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I PENDAHULUAN

Peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat adalah tujuan utama pembangunan suatu daerah yang berkesinambungan. Tujuan tersebut dapat tercapai secara maksimal jika didukung dengan landasan yang kuat. Dukungan informasi dan data yang menggambarkan hal-hal yang benar tentang fenomena yang sedang terjadi serta disajikan tepat pada waktunya sangat penting, agar pembangunan yang dilaksanakan dapat terarah dan tepat sasaran

Salah satu informasi yang diperlukan dan terkait dengan pembangunan masyarakat adalah data statistik yang menggambarkan tentang kondisi kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan data statistik yang menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat di suatu daerah sangat diperlukan untuk mengarahkan perencanaan pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat guna, dan tepat sasaran. Indikator sosial atau Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) di Kabupaten Garut, secara khusus menyajikan kumpulan data statistik yang diharapkan mampu memberikan gambaran sampai sejauh mana perkembangan kesejahteraan penduduk yang telah dicapai, sebagai hasil dari pembangunan yang telah dilaksanakan. Isi Inkesra ini masih bersifat makro mengingat sangat luasnya dimensi cakupan kesejahteraan. Namun demikian, buku ini diharapkan banyak membantu dalam analisis sosial ekonomi kesejahteraan penduduk baik untuk kepentingan perencanaan pembangunan maupun untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan dengan berbagai intervensi yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Garut.

1.1 Ruang Lingkup

Kesejahteraan rakyat mengandung makna kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin seluruh rakyat yang berisikan unsur kualitas kehidupan

beragama, tingkat pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani serta pelayanan sosial dan pemenuhan kebutuhan material masyarakat umumnya. Sedemikian luasnya pengertian kesejahteraan sehingga data statistik ekonomi konvensional seperti pendapatan per kapita masih belum memadai untuk menggambarkan kesejahteraan yang dimaksud.

Pada pengertian yang luas, tidak mungkin untuk menyajikan data statistik secara komprehensif yang mampu mengukur tingkat kesejahteraan penduduk secara paripurna. Indikator yang disajikan pada publikasi ini hanya menyangkut segi-segi kesejahteraan yang dapat diukur (*measurable welfare*), dan statistik sosial merupakan komponen utama dalam penyusunan indikator kesejahteraan rakyat .

1.2 Sistematika

Inkesra Kabupaten Garut Tahun 2020 ini terdiri dari 7 kelompok sektoral yaitu : Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan serta Sosial lainnya yang digambarkan dalam tabel dan gambar/grafik beserta uraiannya yang disajikan secara terpisah dan dalam bab masing-masing.

1.3 Sumber Data

Sumber data Inkesra Kabupaten Garut Tahun 2020 adalah hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2010, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenar) Tahun 2018 dan 2019 serta Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2019. Sumber data tersebut bersifat primer, karena dikumpulkan secara langsung dan diolah oleh BPS.

1.4 Konsep dan Definisi

1.4.1. Rumah tangga dan Anggota Rumah tangga

Rumah tangga dalam hal ini dibedakan menjadi dua, yaitu rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus.

- 1) **Rumah tangga biasa** adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama satu dapur. Yang dimaksud dengan makan satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama menjadi satu.
- 2) **Rumah tangga khusus**, yaitu orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih tidak dicakup dalam Susenas.

Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun sementara tidak ada. Anggota rumah tangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih, dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih dianggap bukan sebagai anggota rumah tangga. Orang yang telah tinggal di suatu rumah tangga 6 bulan atau lebih atau yang telah tinggal di suatu rumah tangga kurang dari 6 bulan, tetapi berniat menetap di rumah tangga tersebut dianggap sebagai anggota rumah tangga.

Kepala rumah tangga adalah seorang dari sekelompok anggota yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga tersebut atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala di dalam rumah tangga tersebut.

1.4.2 Pendidikan

Sekolah adalah sekolah formal mulai dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan.

Tidak/belum pernah sekolah adalah mereka yang tidak/belum pernah sekolah, termasuk mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

Masih bersekolah adalah mereka yang sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.

Tidak sekolah lagi adalah mereka yang pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah, atau tinggi, tetapi pada saat pencacahan tidak sekolah lagi.

Jenjang Pendidikan Tertinggi yang pernah/sedang diduduki (ditamatkan) adalah jenjang pendidikan yang pernah diduduki (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diduduki seseorang yang masih sekolah.

1.4.3 Kesehatan

Sakit adalah menderita banyak penyakit menahun (kronis) atau gangguan kesehatan yang menyebabkan aktivitas kerja terganggu. Walaupun seseorang mempunyai keluhan kesehatan (misalnya masuk angin atau pilek) tetapi bila tidak terganggu kegiatannya sehari-hari maka ia dianggap tidak sakit.

Imunisasi adalah memasukkan kuman penyakit yang sudah dimatikan ke dalam tubuh anak balita dengan cara suntik atau minum dengan maksud agar terjadi kekebalan terhadap jenis penyakit tertentu pada tubuh.

1.4.4 Ketenagakerjaan

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk yang usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan,

paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Penganggur terbuka, terdiri dari:

- a. Mereka yang mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

(lihat pada "*An ILO Manual on Concepts and Methods*")

Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan.

Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang "**baru**", yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila "**tindakan nyata**", seperti: mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan.

Setengah Penganggur (*underemployment*) adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Setengah penganggur terdiri dari :

- **Setengah penganggur terpaksa** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
- **Setengah penganggur sukarela** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35jamseminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain(sebagian pihak menyebutkan sebagai pekerja paruh waktu/ *part time worker*).

Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan adalah jumlah jam kerja yang dilakukan seseorang (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan) selama seminggu yang lalu.

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Mulai tahun 2001 status pekerjaan dibedakan menjadi 7 kategori yaitu: **Berusaha sendiri, Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruhtidak dibayar, Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, Buruh/Karyawan/Pegawai, Pekerja bebas di pertanian, Pekerja bebas di non pertanian, Pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga.**

1.4.5 Konsumsi Pengeluaran Rumah tangga

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga sebulan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran atau konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi dua yaitu konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi pengeluaran untuk keperluan usaha rumah tangga atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran untuk konsumsi makanan ditanyakan selama seminggu yang lalu, sedangkan pengeluaran untuk bukan makanan setahun yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan.

1.4.6 Perumahan

Luas lantai adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan

sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, jemuran, dan warung (sebatas atap).

Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumah tangga atau bangunan lain.

Atap adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami di bawahnya terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.

<https://garutkab.bps.go.id>

<https://garutkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB II KEPENDUDUKAN

Isu kependudukan yang kian mengemuka belakangan ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lain penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

Series data kependudukan diperlukan untuk mengetahui apakah pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh lapisan masyarakat, terutama pembangunan yang berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Pemerintah telah membuat proyeksi penduduk terbaru berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010.

2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Salah satu masalah klasik kependudukan yang terjadi di Jawa Barat dan terus menjadi perhatian pemerintah adalah jumlah penduduk Jawa Barat yang besar. Dalam hal jumlah penduduk, Jawa Barat adalah provinsi yang menduduki peringkat pertama di Indonesia dengan jumlah penduduk yang paling banyak (hampir 1/5 penduduk Indonesia). Sedangkan untuk Kabupaten Garut sendiri,

jumlah penduduknya menduduki peringkat ke-5 dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Jumlah penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2019 berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2020 tercatat sebanyak 2,62 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan sekitar 0,01 juta jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Tahun 2018 yang mencapai 2,61 juta jiwa. Bila dibandingkan dengan sembilan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2010, jumlah penduduk Garut saat ini mengalami peningkatan sekitar 7,60 persen dari jumlah penduduk pada waktu pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 2010 yang sebesar 2,42 juta jiwa. Dengan kata lain, selama kurun waktu sembilan tahun terakhir jumlah penduduk Garut telah mengalami penambahan penduduk sebesar 0,18 juta jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk Garut pada tahun 2015-2019 tercatat sebesar 3,75 persen. Laju pertumbuhan yang relatif tetap selama empat tahun terakhir menggambarkan bahwa program pemerintah yang berkaitan dengan pengendalian penduduk cukup berhasil. Hal tersebut perlu ditingkatkan sehingga laju pertumbuhan penduduk bisa semakin dikendalikan setiap tahunnya.

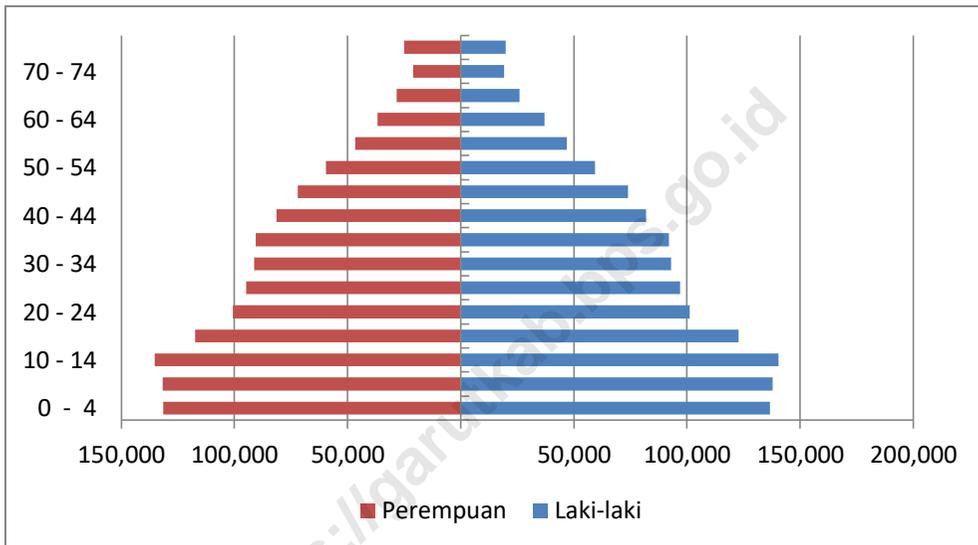
Tabel 2.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Garut, 2015-2019

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)	Rasio Jenis Kelamin
2015	2,548,723	0.89	101.65
2016	2,569,505	0.82	101.55
2017	2,588,839	0.75	101.43
2018	2,606,399	0.68	101.33
2019	2,622,425	0.61	101.21

Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan, rasio jenis kelamin penduduk Garut pada tahun 2019 sebesar 101,21. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 101,21 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk perempuan di

Kabupaten Garut lebih sedikit daripada jumlah penduduk laki-laki. Dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, terdapat 6 Kabupaten/Kota yang memiliki rasio jenis kelamin di bawah 100, namun di Kabupaten Garut merupakan salah satu yang sex rasionya diatas 100.

Grafik 2.1 Piramida Penduduk Kabupaten Garut Tahun 2019



Komposisi penduduk Kabupaten Garut memiliki tipe piramida Ekspansif, yang menggambarkan jumlah penduduk muda lebih besar daripada penduduk usia tua. Jumlah penduduk usia 0-4 tahun, baik laki-laki maupun perempuan lebih rendah dibandingkan dengan kelompok umur 5-9 tahun. Hal ini menunjukkan pemerintah Kabupaten Garut berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih rendah/ stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kemudian pada *range* kelompok umur 20 sampai 35 tahun cenderung lebih sedikit. Hal tersebut menggambarkan bahwa migrasi pada kelompok penduduk tersebut cukup tinggi. Bentuk piramida penduduk yang cenderung semakin meruncing ke atas menunjukkan bahwa tingkat mortalitas pada usia lansia di Kabupaten Garut masih terbilang tinggi. Pola antara kelompok penduduk laki-laki dan perempuan relatif hampir sama.

2.2 Kepadatan Penduduk

Kendati Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Garut akhir-akhir ini tampak relative terkendali, namun secara makro jumlah penduduk terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sementara di sisi lain secara agregat luas wilayah Kabupaten Garut tidak mengalami peningkatan. Hal tersebut secara langsung berdampak pada tingkat kepadatan penduduk (population density) yang secara otomatis terus menerus mengalami peningkatan. Indikator tingkat kepadatan penduduk ini dapat dijadikan suatu gambaran akan kemampuan suatu wilayah dalam memberikan daya dukung berupa sarana atau prasarana dan daya tampung terhadap penduduk.

Grafik 2.2. Perkembangan Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten Garut Periode 2011-2019 (Jiwa/Km²)



Kabupaten Garut yang memiliki luas sekitar 3.065,19 km² dengan jumlah penduduk sebesar 2.622.425 jiwa di tahun 2019, maka tingkat kepadatan penduduk pada tahun tersebut tercatat sebesar 856 orang per km². Sementara jika dibandingkan dengan tahun 2010, dimana jumlah penduduk sebanyak 2.606.399 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 790 orang per km², maka

selama kurun waktu sembilan tahun telah terjadi peningkatan kepadatan penduduk sekitar 65 orang per km² . Perkembangan indikator tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Garut selama periode 2010-2019 dapat dilihat dari Grafik 2.2.

2.3 Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Hal ini disebabkan dengan semakin kecilnya angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Selama periode 2013-2019 angka beban ketergantungan di Kabupaten Garut setiap tahun cenderung mengalami penurunan. Angka beban tanggungan di Garut sebesar 57.65 persen pada tahun 2019. Artinya, setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban sekitar 58 penduduk tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

Tabel 2.2 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Garut, 2013-2019

Kelompok Umur (tahun)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0-14	31.91	31.91	31.9	30.86	30.52	30.19	29.97
15-64	62.65	62.64	62.63	63.16	63.29	63.39	63.43
65+	5.44	5.46	5.47	5.97	6.19	6.42	6.60
Angka beban ketergantungan	59.62	59.66	59.67	58.31	57.99	57.75	57.65

Rasio ketergantungan yang terus cenderung menurun belakangan ini diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi manusia guna mendorong produksi. Namun perlu diketahui bahwa di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja tetapi di sisi lain mereka dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika diantara mereka banyak yang tidak bekerja. Mereka dikatakan usia produktif tapi tidak dapat dimanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja.

Pada Tabel 2.2 juga dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk Garut masih didominasi oleh penduduk usia produktif yang berdasarkan Proyeksi Penduduk Garut 2010-2020 sekitar 63.43 persen pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Garut menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Sementara itu, proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) semakin bertambah dari 5.44 persen pada tahun 2013 menjadi 6.60 persen pada tahun 2019. Meningkatnya angka beban ketergantungan merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk menata program pembangunan agar lebih baik lagi.

BAB III KESEHATAN

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang serta meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Upaya Pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah; meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga

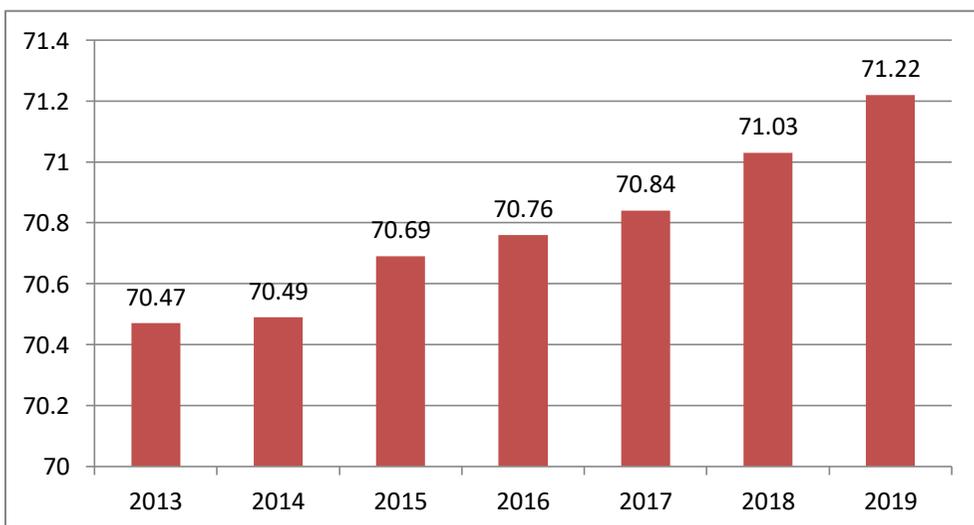
medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

3.1 Derajat dan Status Kesehatan

Tingkat kesehatan di suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari besarnya usia harapan hidup penduduknya. Sumber data analisis untuk harapan hidup, semakin membaiknya kondisi kesehatan masyarakat Garut telah diiringi dengan peningkatan angka harapan hidup, tercatat dari berumur 70,47 tahun (tahun 2013) menjadi lebih panjang usia mencapai 71,22 tahun (Tahun 2019). Peningkatan angka harapan hidup ini karena sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain: semakin baik dan teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan disertai semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Bila kita bandingkan dengan nilai angka harapan hidup Provinsi Jawa Barat, maka dapat dilihat bahwa angka harapan hidup Kabupaten Garut masih dibawah rata-rata. Pada Tahun 2019, angka harapan hidup Provinsi Jawa Barat adalah 72,85

Grafik 3.1 Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Garut, 2013-2019



Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, maka Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit). Hasil Susenas Tahun 2018 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Garut mencapai 18,26 persen, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 29,14 persen.

Lamanya sakit merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai kondisi keluhan kesehatan yang dirasakan oleh penduduk suatu wilayah.

Hasil Susenas 2019 menunjukkan bahwa dari anak usia 0-23 bulan yang pernah disusui di Garut sebanyak 95,14 persen. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat secara umum, ternyata nilai persentase anak usia 0-23 bulan yang pernah disusui di Garut pada tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Barat.

Tabel 3.1 Persentase Anak Usia 0-23 Bulan yang Pernah Disusui dan Rata-rata Lama Disusui di Kabupaten Garut, Tahun 2019

Rincian	Anak Usia 0-23 bulan yang Pernah Disusui (%)	Rata-rata Lama Disusui (bulan)
Garut	95,14	10,54
Jawa Barat	95,41	10,38

Dianjurkan seorang ibu dapat menyusui bayinya selama 2 tahun, karena semakin lama bayi mendapatkan ASI akan memberikan kekebalan/proteksi yang lebih kuat. Bila dilihat rata-rata lama bayi disusui pada Tahun 2019, maka terlihat rata-rata lama disusui berada pada kisaran 10,54 bulan, hal di atas rata-rata lama disusui untuk Provinsi Jawa Barat yaitu di kisaran 10,38 bulan.

Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Jenis imunisasi ada dua macam yaitu imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif di mana kekebalan didapat dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik atau tetes. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang di sekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili dan Hepatitis B.

Tabel 3.2 Persentase Anak Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Pernah Di imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Garut, 2018 dan 2019

Imunisasi	2018	2019
BCG	87,10	86.49
DPT	78,20	80.29
POLIO	86,22	85.64
CAMPAK	64,66	64.29
HEPATITIS B	73,92	82.23

Dalam kurun waktu 2 tahun berdasarkan hasil Susenas 2018 dan 2019, mayoritas anak umur 0-59 bulan (Balita) yang mendapatkan imunisasi wajib secara umum mencapai kisaran di atas 80 persen. Namun, balita yang mendapatkan imunisasi CAMPAK masih di bawah 80 persen dan mengalami penurunan persentasenya, dimana pada tahun 2018 ada sekitar 64.66 persen menurun

menjadi 64,29 persen pada Tahun 2019. Penurunan ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah serta pihak-pihak terkait.

<https://garutkab.bps.go.id>

<https://garutkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB IV PENDIDIKAN

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat 1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, UU No 20 tahun 2003 tersebut juga dijelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem

yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warganegara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan, dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar, dan daya dukung lainnya juga perlu diupayakan pemerintah.

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, diantaranya : Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Lama Sekolah (EYS), dan Tingkatan Sekolah. Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS.

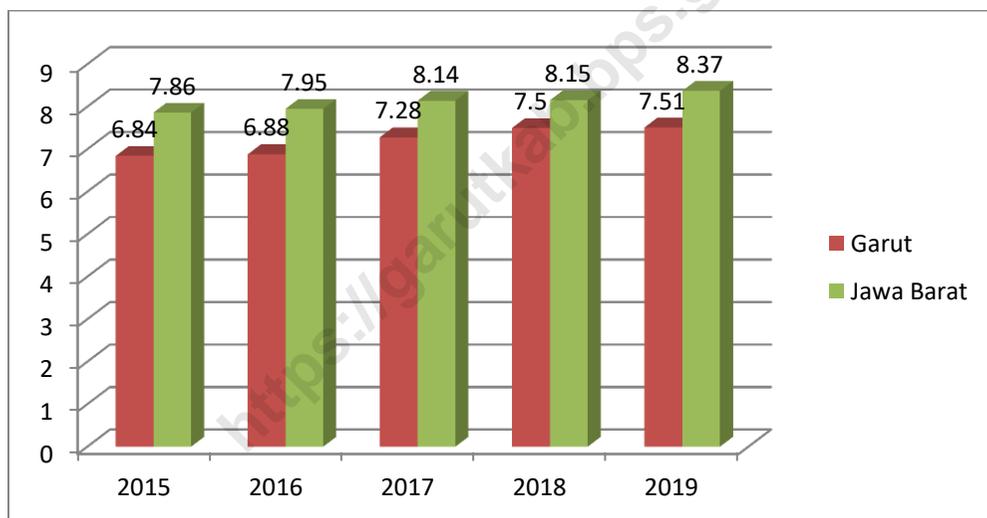
4.1 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan.

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menempuh berbagai upaya dengan meningkatkan waktu rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antar jenjang pendidikan. Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, cara paling efektif untuk menaikkan waktu rata-rata lama sekolah bukan

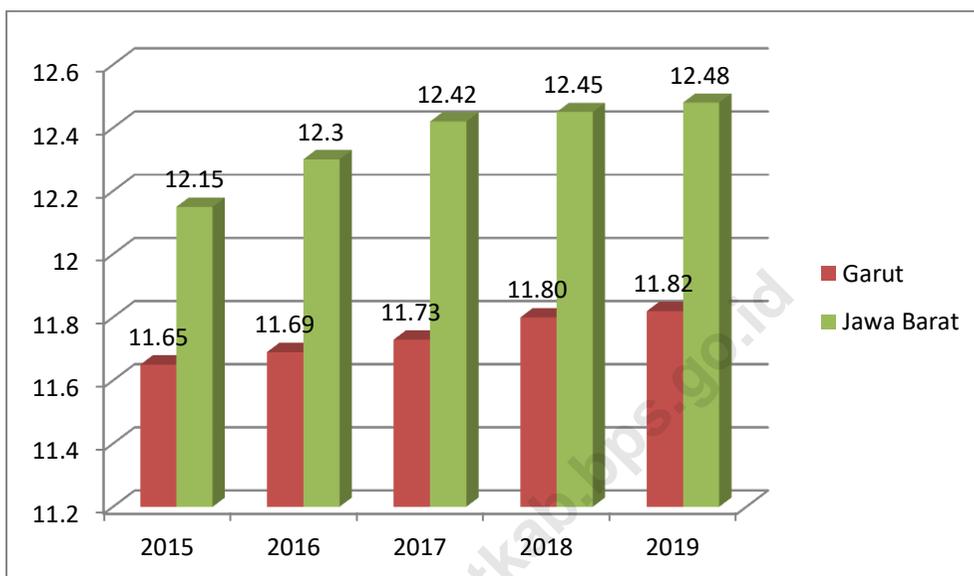
dengan menyekolahkan kembali penduduk Indonesia yang telah berusia lanjut, tetapi mengupayakan agar tidak ada lagi peserta didik yang putus sekolah. Upaya lain yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), meningkatkan partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang bermutu, meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah, meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi, serta meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Grafik 4.1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) (tahun) di Kabupaten Garut dan Provinsi Jawa Barat, 2015-2019



Secara umum rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Garut pada tahun 2019 mencapai 7.51 tahun atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (7.50 tahun). Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk Garut baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 1 SMP atau putus di kelas 2 SMP

Grafik 4.2 Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) (tahun) di Kabupaten Garut dan Provinsi Jawa Barat, 2015-2019



Angka Harapan Lama Sekolah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan secara berturut-turut 11.65 tahun, 11.69 tahun 2016, 11.73 Tahun 2017, 11.80 Tahun 2018 dan 11.82 tahun di tahun 2019. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Garut di bawah rata-rata lama sekolah provinsi Jawa Barat (12.48 tahun), juga Kabupaten Garut menjadi salah satu kabupaten/kota yang rata-rata lama sekolahnya terendah diantara 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

4.2 Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/ keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang lebih tinggi. Dengan semakin meningkatnya keterampilan/keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk

bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Tabel 4.2 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/ STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut, 2018 dan 2019

Ijazah yang Ditamatkan	2018			2019		
	L	P	L+P	L	P	L+P
Tidak Mempunyai Ijazah	24.48	26.78	25.64	10.13	14.42	12.27
SD/Sederajat	35.60	36.70	36.15	39.49	40.95	40.22
SMP/Sederajat	19.40	19.89	19.65	24.72	23.55	24.13
SMA/Sederajat *)	16.68	13.42	15.04	25.66	21.09	23.37
D1/D2 /D3/sarjana muda	0.59	0.47	0.53	-	-	-
DIV/S1/S2/S3	3.02	2.74	2.88	-	-	-

*) Tahun 2019, SMA ke atas

Pada tahun 2019, penduduk usia 15 tahun ke atas yang menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan SMP di Garut mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang menamatkan jenjang pendidikan SMP Tahun 2019 mencapai 24.13 persen, sedangkan pada tahun 2018 mencapai 19.65 persen. Adapun persentase penduduk dengan ijazah yang ditamatkannya pada tingkat SD/MI/SDLB/ Paket A mengalami kenaikan yang cukup drastis yaitu 36.70 persen pada Tahun 2018 menjadi 40.22 persen pada tahun 2019.

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan yang telah ditamatkan, secara umum persentase penduduk yang tidak mempunyai ijazah pendidikan mengalami penurunan drastis dari 25.64 persen pada Tahun 2018 menjadi 12.27 persen di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa naiknya kesadaran masyarakat bahwa pendidikan sangat penting. sehingga masyarakat aktif berpartisipasi dalam pendidikan. Diharapkan kesadaran masyarakat ini terus meningkat sehingga

mampu menurunkan jumlah masyarakat yang tidak bersekolah. Dengan kata lain, masyarakat yang menyadari bahwa pendidikan itu sangat penting akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pada Tabel 4.2 di atas, tercatat bahwa tingkat pendidikan penduduk laki-laki lebih baik dari perempuan. Hal ini terlihat pada tingkat pendidikan SD ke bawah (termasuk belum tamat SD dan tidak/belum bersekolah), dimana persentase laki-laki mencapai 49.62 persen sedangkan perempuan persentasenya lebih tinggi yaitu 55.37 persen.

Jika kita telaah secara garis besar dapat kita lihat bahwa semakin rendah tingkat pendidikan, persentase perempuan selalu lebih tinggi dari laki-laki, tetapi mulai SMA/Sederajat ke atas persentase laki-laki menjadi lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini merupakan warisan era masa lalu yang berkaitan dengan kultur budaya kita yang lebih mengedepankan laki-laki dibandingkan perempuan. Tentu saja ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua untuk terus mengkampanyekan pentingnya pendidikan baik laki-laki maupun perempuan.

BAB V KETENAGAKERJAAN

Permasalahan di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan wilayah dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2019 kondisi Agustus. Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja, serta persentase pekerja menurut kelompok upah/gaji/pendapatan bersih.

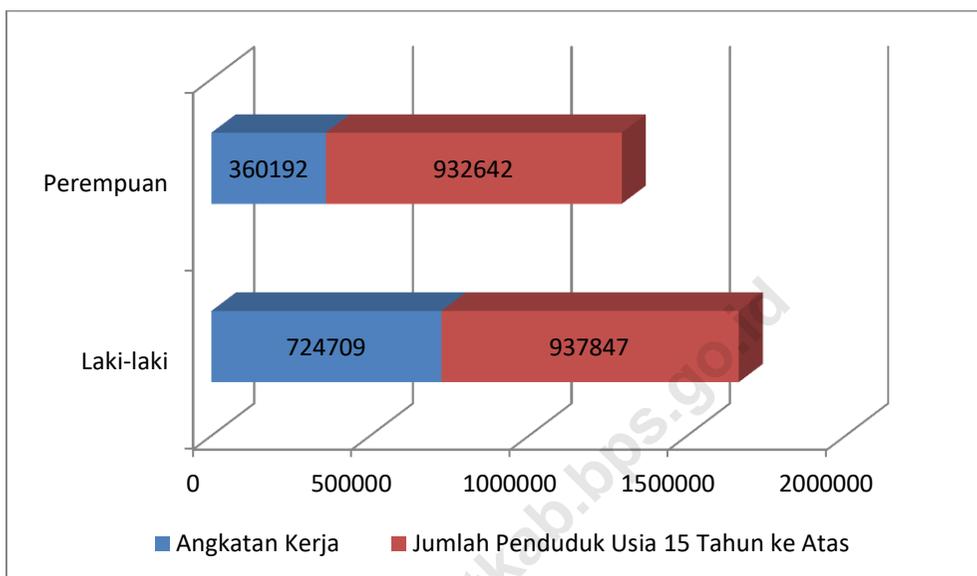
5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Penduduk usia kerja (lebih dari 15 tahun) di Kabupaten Garut Agustus 2019 sebanyak 1.87 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk bukan angkatan kerja mencapai 0.70 juta orang atau 37 persen dari penduduk usia kerja.

Grafik 5.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas dan Angkatan Kerja di Kabupaten Garut, Agustus 2019



Sumber : Sakernas, Agustus 2019

Jika dilihat jumlah penduduk usia kerja menurut jenis kelamin pada periode Agustus 2019, jumlah penduduk Laki-laki sebesar 724.7 ribu orang atau sebesar 38.58 persen dari total jumlah penduduk usia kerja. Sedangkan untuk perempuan sebesar 360.2 ribu orang atau 19.17 persen dari total penduduk usia kerja.

Dari total angkatan kerja sebanyak 1.170 juta orang pada Agustus 2019, sebanyak 92.65 persennya melakukan aktivitas bekerja atau sebanyak 1.084 juta orang. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

<https://garutkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB VI TARAF DAN POLA KONSUMSI

P

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

6.1 Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 6.1 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Garut, 2018 dan 2019

Jenis Pengeluaran	Nominal (Rp.)		Persen (%)	
	2018	2019	2018	2019
1.Padi- padian	75 438	75 039	8.43	8.95
2.Umbi-umbian	4 641	4 056	0.52	0.48
3.Ikan/Udang/Cumi/Kerang	23 680	19 488	2.65	2.32
4.Daging	24 860	23 018	2.78	2.75
5.Telur dan susu	24 980	23 846	2.79	2.84
6.Sayur-sayuran	26 923	21 938	3.01	2.62
7.Kacang-kacangan	12 961	11 181	1.45	1.33
8.Buah-buahan	21 541	16 075	2.41	1.92
9.Minyak dan Kelapa	14 384	12 139	1.61	1.45
10. Bahan minuman	18 434	17 153	2.06	2.05
11. Bumbu-bumbuan	9 340	8 658	1.04	1.03
12. Konsumsi lainnya	13 346	13 815	1.49	1.65
13. Makanan dan minuman jadi	160 632	154 823	17.96	18.46
14. Rokok	88 004	89 719	9.84	10.70
Jumlah Makanan	519 163	490 955	58.05	58.55
15. Perumahan dan fasilitas rumah tangga	172 012	177 872	19.23	21.21
16. Aneka barang dan jasa	90 095	79 682	10.07	9.50
17. Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	30 081	25 503	3.36	3.04
18. Barang-barang yang tahan lama	48 330	31 800	5.4	3.79
19. Pajak, pungutan, dan asuransi	12 951	15 179	1.45	1.81
20. Keperluan pesta dan upacara	21 740	17 493	2.43	2.09
Jumlah Bukan Makanan	375 209	347 532	41.95	41.45
Total	894 372	838 488	100	100

Tabel 6.1 di atas menyajikan data pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan 2018 dan 2019. Dari tabel tersebut terlihat bahwa selama periode 2018-2019 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk mengalami penurunan dari Rp 894.372,- menjadi Rp 838.488,-. Bila dilihat persentasenya pengeluaran untuk makanan mengalami kenaikan dari 58.05 persen pada Tahun 2018 menjadi 58,55 persen pada tahun 2019. Penurunan pengeluaran pada kelompok makanan terjadi pada semua jenis pengeluaran,

kecuali pengeluaran untuk padi-padian, telur dan susu, konsumsi lainnya, makanan dan minuman jadi, dan rokok berturut-turut yaitu : dari 8.43 persen di Tahun 2018 menjadi 8.95 persen di Tahun 2019, 2.79 persen pada Tahun 2018 menjadi 2.84 persen di Tahun 2019, 1.49 persen pada Tahun 2018 menjadi 1.65 persen di Tahun 2019, 17.96 persen pada Tahun 2018 menjadi 18.46 persen di tahun 2019, 9.84 persen pada Tahun 2018 menjadi 10.70 persen di Tahun 2019.

Begitu pula dengan pengeluaran bukan makanan mengalami penurunan dari 41.95 persen di Tahun 2018 menjadi 41,45 persen di tahun 2019. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan kesejahteraan. Sedangkan kenaikan kontribusi tertinggi dari kelompok bukan makanan disebabkan oleh kelompok komoditi perumahan dan fasilitas rumah tangga dan komoditi pajak, pungutan, dan asuransi.

Rata-rata pengeluaran untuk makanan pada tahun 2019 secara persentase mengalami kenaikan sebesar 0.5 persen dibanding dengan Tahun 2018, meskipun secara angka terlihat ada penurunan yaitu dari Rp 519,163.- menjadi Rp 490,955.- per kapita sebulan. Sebaliknya pengeluaran untuk bukan makanan mengalami penurunan sebesar 0.50 persen yaitu dari Rp 375,209.- pada 2018 menjadi Rp 347,532.- pada tahun 2019.

Penurunan pendapatan ini dikarenakan tidak adanya pemerataan pendapatan, karena pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatan. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://garutkab.bps.go.id>

BAB VII PERUMAHAN

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberi ketenteraman hidup bagi manusia. Dalam fungsinya sebagai pengamanan diri bukan berarti menutup diri tetapi harus membuka diri menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan (Kepmen no.9 tahun 1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standar minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif

dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

7.1 Fasilitas Rumah Tinggal

Selain kualitasnya, kenyamanan rumah tinggal juga ditentukan oleh kelengkapan fasilitasnya yang sesuai dengan standar kesehatan. Yang termasuk dalam fasilitas tersebut adalah tersedianya air minum dan sanitasi yang layak, serta adanya penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan memasak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Sedemikian pentingnya ketersediaan fasilitas ini hingga menjadi salah satu target yang harus dipenuhi dalam tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals - MDGs). Target tersebut adalah menurunkan hingga separuhnya proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum layak dan sanitasi layak pada 2019.

Berdasarkan kriteria yang digunakan dalam MDGs tersebut, rumah tangga yang memiliki sumber air minum layak adalah rumah tangga yang air minumnya bersumber dari ledeng, air hujan atau dari pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak dari tempat pembuangan limbah (tangki septik) terdekat lebih dari 10 m. Dalam hal ini, menggunakan air kemasan maupun isi ulang untuk minum tidak termasuk memiliki sumber air minum yang layak.

Tabel 7.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Garut Tahun 2019

Uraian		Persentase
(1)		(2)
1	Air Minum Bersih *)	57.29
2	Sumur dan Mata Air Terlindung *)	36.44
3	Fasilitas Tempat Buang Air Besar:	
	- Ada, digunakan hanya ART sendiri	73.30
	- Lainnya	26.70
	- Total	100.00
4	Sumber penerangan listrik PLN *)	99.69

Sumber : Susenas 2019 (diolah)

***) Susenas 2018**

- Catatan : 1) Air yang bersumber dari air kemasan/isi ulang, ledeng, dan dari pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jaraknya ke tempat pembuangan limbah terdekat >10 m.
- 2) Fasilitas tempat BAB sendiri atau bersama, jenis kloset leher angsa dan tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir kotoran

Pada Tabel 7.1 tampak bahwa persentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih pada tahun 2018 mencapai 57,29 persen. Bila dilihat lagi dengan lebih mendetil terhadap sumber air minum yang digunakan maka terlihat bahwa di Kabupaten Garut 36,44 persen rumah tangganya menggunakan air dari sumur terlindung dan mata air terlindung. Baik sumur terlindung maupun mata air terlindung apabila jarak keduanya dari tempat penampungan kotoran terdekat lebih dari 10 m, maka kedua sumber air minum ini cukup sehat untuk digunakan.

Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik PLN, karena cahaya listriknya lebih terang dibandingkan sumber penerangan lain. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2018, sebanyak 99,69 persen rumah tangga telah menikmati fasilitas listrik

PLN yang berarti hanya sangat sedikit rumah tangga (dibawah 1 persen) yang belum menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan utama.

7.2 Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Status kepemilikan rumah tinggal merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup disini adalah rumah milik sendiri, kontrak, dan lainnya (sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orangtua/saudara atau status kepemilikan lainnya). Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Tabel 7.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Indikator Kepemilikan Tempat Tinggal di Kabupaten Garut, Tahun 2018

	Uraian	Persentase
1	Milik sendiri	90.15
4	Lainnya	9.85
	Total	100.00

BAB VIII SOSIAL LAINNYA

Aspek sosial lain seperti akses pada teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menjadi indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat. Perkembangan gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang didapat melalui peralatan komunikasi seperti telepon selular pintar dan komputer. Jenis akses dan media informasi yang beragam tentunya menjadi pilihan bagi masyarakat dalam mengikuti tren gaya hidup modern. Semakin terjangkaunya harga telepon pintar dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi yang mereka inginkan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari akses terhadap pelayanan publik seperti kredit usaha dan pelayanan kesehatan gratis, serta tingkat keamanan wilayahnya. Semakin besar masyarakat mendapatkan pelayanan kredit usaha semakin mempermudah masyarakat untuk meningkatkan aktivitas usahanya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kesehatan gratis menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu. Dengan pelayanan kesehatan gratis tersebut masyarakat dapat mengalihkan pendapatannya pada keperluan hidup lainnya guna meningkatkan kesejahteraannya.

Rasa aman dan adanya perlindungan dari negara terhadap masyarakat dari gangguan dan ancaman kejahatan diperlukan oleh masyarakat agar dapat beraktivitas dan bekerja. Semakin rendah tingkat kejahatan di suatu wilayah menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan sosial di wilayah tersebut.

8.1 Akses Informasi dan Komunikasi

Perkembangan telepon seluler cenderung berdampak kepada kepemilikan rumah tangga atas telepon biasa atau telepon rumah. Pesatnya perkembangan teknologi telepon seluler membuat telepon rumah semakin ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kepemilikan telepon rumah dan meningkatnya kepemilikan telepon seluler. Penggunaan telepon rumah yang mengharuskan seseorang berada di posisi tertentu yang terpasang jaringan telepon semakin ditinggalkan masyarakat karena dianggap kurang efisien dalam mendukung mobilitas penggunanya.

Di tahun 2019 penggunaan telepon seluler meningkat 8,7 persen dibandingkan Tahun 2018, dari 56.51 persen menjadi 65.21 persen. Kemudian apabila kita lihat berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang menggunakan telepon seluler selalu lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan pada setiap tahunnya. Pada Tahun 2018, baik itu persentase penduduk laki-laki maupun persentase penduduk perempuan yang menggunakan telepon seluler keduanya mengalami peningkatan, dari 62.44 persen untuk laki-laki dan 50.76 persen untuk perempuan, masing-masing meningkat menjadi berturut-turut 68.60 persen dan 61.77 persen. Penggunaan telepon seluler meningkat karena praktis, dapat dibawa bepergian kemana-mana, lebih bersifat pribadi, dan tersedianya kecanggihan teknologi dalam telepon seluler yang dapat mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, menyimpan gambar (foto) dan video, serta merekam gambar dan suara, dan lain-lain.

Tabel 8.2 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Garut, 2018 - 2019

Alat Komunikasi	Laki-Laki	Perempuan	L+P
Telepon Seluler / Komputer			
2018	64.01	62.13	63.08
2019	70.40	62.69	66.57
Akses Internet			
2018	36.56	31.61	34.10
2019	41.04	35.87	38.47

Sementara itu, perkembangan penduduk yang mempunyai akses terhadap Telepon Seluler/komputer pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 3,49 persen dibandingkan Tahun 2018, dari 63.08 persen di Tahun 2018 menjadi 66.57 persen di tahun 2019. Aplikasi terhadap teknologi komunikasi dan informasi salah satunya adalah akses internet, media internet digunakan karena memiliki sifat instan, interaktif dan menarik. Pada tahun 2019, secara umum terjadi peningkatan sebesar 4.37 persen penduduk yang mengakses internet, dari 34.10 persen di tahun sebelumnya menjadi 38.47 persen di tahun 2019.

Pada tabel 8.2 dapat dilihat bahwa persentase penduduk laki-laki yang memiliki akses terhadap Telepon Seluler/komputer dan internet selalu lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk perempuan. Pada tahun 2018, persentase penduduk laki-laki yang memiliki akses terhadap Telepon Seluler/komputer dan internet berturut-turut adalah 70.40 persen dan 41.04 persen. Sedangkan persentase penduduk perempuan yang memiliki akses Telepon Seluler/komputer dan internet berturut-turut adalah 62.69 persen dan 35.87 persen. Selisih persentase penduduk laki-laki dan perempuan relatif kecil. Hal ini menandakan selain dari segi pendidikan, ternyata dari segi akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi pun sudah semakin menunjukkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Jika akses terhadap teknologi informasi dan

komunikasi biasanya cenderung identik dengan laki-laki, seiring perkembangan zaman, perempuan pun sudah semakin banyak yang mengakses dan menguasai bahkan ahli di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

<https://garutkab.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKANBANGSA



**BADANPUSATSTATISTIK
KABUPATENGARUT**

Jl. Pembangunan No. 222 Telp. & Facs. (0262) 233273 Tarogong
Garut 44151